

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Setelah adanya gerakan reformasi pada tahun 1998, otonomi daerah daerah mulai dilaksanakan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan sejak adanya otonomi daerah, perkembangan akuntansi sektor publik semakin berkembang. Perkembangan akuntansi sektor publik tidak hanya disebabkan karena adanya otonomi daerah, namun *globalisasi* juga turut menjadi penyebabnya. Saat ini disetiap daerah dituntut untuk membangun dan menata pemerintahannya dengan baik (*good governance*).

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dari baiknya tata kelola pemerintahan daerah tersebut. Laporan keuangan daerah harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realiasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, karakteristik kualitatif keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Suatu laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan baik apabila kualitas laporannya baik pula (sesuai karakteristik dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah).

Kualitas laporan keuangan dapat ditentukan dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Salah satu faktor dari penentu kualitas sumber daya manusia bagi organisasi pemerintah yaitu memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Hal itu dikarenakan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan telah memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai mengenai akuntansi dan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk mencegah adanya kecurangan. Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Sistem Pengendalian Intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik dan berkualitas disusun berdasarkan standar yang berlaku. Standar dan sistem akuntansi perlu diterapkan secara konsisten agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan penilaian berupa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Jika suatu daerah mendapatkan opini WTP, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki laporan keuangan yang berkualitas.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Ide pembentukan Kabupaten Pali dilandasi beberapa faktor seperti perkembangan pembangunan Kabupaten Muara Enim dan adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang memandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam, kemampuan ekonomi, serta kemampuan sumber daya manusia di daerah Pali juga menjadi faktor penting pendorong ide pemekaran.

Data hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pali sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Pali

Tahun Anggaran	Opini BPK
2014	TMP (Tidak Memberikan Pendapat)
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pali dari tahun awal pemekaran yaitu tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada tahun 2014 Kabupaten Pali mendapatkan opini TMP, lalu pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP, dan kemudian pada tahun 2016 Kabupaten Pali mendapatkan opini WTP. Terlihat peningkatan opini yang diberikan oleh BPK Kepada Kabupaten Pali dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Pali.

Namun pada tahun 2017 Kabupaten Pali mendapatkan opini WDP dari BPK. Hal ini merupakan penurunan dari kualitas laporan keuangan.

Penempatan atau promosi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan harus sesuai dengan kompetensi jabatan yang diisyaratkan dalam jabatan tersebut. Mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang seharusnya dilakukan dalam suatu organisasi dalam rangka penyegaran dan bentuk penghargaan bagi aparatur yang memiliki kompetensi sehingga aparatur akan lebih terpacu untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pada tahun 2017 terdapat fakta dilapangan dan dari pemberitaan diberbagai media ternyata masih banyak instansi pemerintah, Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menempatkan dan mempromosikan pejabat tidak mengacu pada kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Akibatnya di beberapa daerah, termasuk di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan muncul permasalahan serius (<https://palembang.tribunnews.com/2017/06/28/uji-kompetensi-dan-promosi-jabatan-pns>).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Pali pada tahun anggaran 2017 terdapat beberapa hal perlu menjadi perhatian, yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya rivi laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah belum dilakukan secara memadai, pengelolaan Kas Daerah belum dilaksanakan secara tertib, dan pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran belum tertib dan terdapat pinjaman yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, misalnya bukti pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada lima OPD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp. 687.981.911,62, dan perjalanan dinas pada tujuh OPD tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 2.138.773.089,00.

Kompetensi (Sukmaningrum, 2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (Wirawan, 2015:18) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Maka dapat

disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dalam organisasinya.

Sistem Pengendalian Internal (Arens, 2014) terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk mendeteksi adanya kecurangan dan berguna sebagai pengawas, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Maka dapat dikatakan standar akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintah diantaranya dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018) berkesimpulan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif, dan Pujanira (2017) berkesimpulan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berbeda dengan penelitian Prabangsari (2018), yang menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi SDM, SPI, dan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)”**. Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Kabupaten Pali dengan objek penelitian seluruh OPD di Kabupaten Pali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali ?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali ?
3. Apakah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali ?
4. Apakah sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai:

1. Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pali yang dimaksud adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan di seluruh OPD Kabupaten Pali.
2. Penelitian ini dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari bendahara, kabid keuangan, dan staf-staf keuangan yang bekerja pada setiap OPD di Kabupaten Pali sebagai responden.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.
3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.
4. Pengaruh penerapan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi

Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Pali. Sehingga bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan mudah untuk dipahami bagi para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Institusi

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi program studi Akuntansi Sektor Publik yang tertarik untuk meneliti yang berhubungan dengan pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Pali.